

# EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “ISLAM MELAYU NUSANTARA” SEBAGAI DISTINGSI UIN RADEN FATAH

**Afriantoni**

Faculty of Tarbiyah and Teaching Sciences  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
E-mail: *afriantoni\_uin@radenfatah.ac.id*

**Herman Zaini**

*UIN Raden Fatah Palembang*  
*hermanzaini@yahoo.com*

## **Abstract**

Perguruan tinggi adalah institusi yang membidani kelahiran sumber daya intelektual berkualitas. Perguruan tinggi memberikan kontribusi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah sebagai salah satu Perguruan Tinggi Islam yang berada di Kota Palembang. Secara faktual, IAIN Raden Fatah melakukan pengembangan dan perencanaan perubahan kelembangan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah. Usaha pengembangan dilakukan sejak tahun 2003. Usaha tersebut menarik dikaji dan diteliti secara lebih mendalam. Sebagai organisasi publik, visi organisasi sangat penting dan menentukan roda organisasi mempengaruhi misi dan mekanisme manajemen secara menyeluruh. Visi organisasi IAIN mempengaruhi struktur organisasi, keilmuan dan peran lembaga sebagai pelopor perubahan dan kesiapan menghadapi daya saing global. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perumusan visi, pengembangan orientasi keilmuan dan daya saing sebagai dasar usaha pihak manajemen kampus dalam melakukan sebuah proses perubahan. Manajemen perubahan dilakukan sebagai kerangka teoritis untuk mengetahui proses yang dilakukan IAIN mencapai cita-cita besar yakni menjadi UIN Raden Fatah. Diakui bahwa perubahan yang dilakukan telah menghabiskan waktu setidaknya 10 tahun lamanya, dan pada tahun 2014 mulai terlihat hasilnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa visi yang digagas, dirumuskan dan diimplementasikan sebagai rujukan segenap sivitas akademika IAIN Raden Fatah yang tercatat 19 kali mengalami perubahan dan sangat mempengaruhi kinerja kelembagaan dalam mencapai cita-cita besar tersebut. Dalam konteks keilmuan, model keilmuan yang dirumuskan oleh Ismail tentang “Rumah Ilmu” bisa diterima sebagai perencanaan pengembangan IAIN Raden Fatah. Tantangan terbesar adalah daya saing global dan antar lembaga dengan perbaikan kurikulum, evaluasi, materi, dan pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan lainnya.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Melayu, Nusantara

## **Introduction**

Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah sebuah lompatan perubahan manajemen pendidikan tinggi yang menarik. Terutama UIN Raden Fatah menjadikan “Islam Melayu Nusantara” sebagai distingsi sekaligus kebijakan dalam bidang akademik menuju universitas berstandar internasional (Tim Penyusun, 2014).

Untuk melakukan evaluasi implementasi kebijakan Islam Melayu Nusantara sebagai distingsi UIN Raden Fatah Palembang. Upaya ini dilakukan dalam berbagai diskusi salah satunya adalah mengembalikan kejayaan Palembang melalui universitas dalamkajian akademiknya (Berita Pagi, 2018). Menariknya penelitian ini setidaknya ada dua. *Pertama*, Islam Melayu adalah amanah dari Kementerian Agama RI, berdasarkan rekam digital media online terdapat wawancara dengan Aflatun Muchtar (Rektor UIN Raden Fatah Pertam) bahwa berdasarkan Keputusan Kementerian Agama (Kemenag) yang ingin masing-masing PT memiliki keunggulan, dimana sebagai identitas, IAIN Raden Fatah sendiri yang ingin pusat Peradaban Islam Melayu adanya di Palembang. *Kedua*,

satu tanggung jawab akademik, IAIN Raden Fatah berusaha menjaga peradaban tersebut dengan menjadikan Peradaban Islam Melayu sebagai program studi (prodi) unggulan (Sriwijaya Post, 2014).

Dalam konteks penelitian ini, setidaknya beberapa hal yang menarik dalam kajian evaluasi ini. *Pertama*, dinamika arah pengembangan dengan membangun “distingsi” perkembangan kelembagaan dan keilmuan memang selayaknya dibicarakan terbuka agar dinamika keilmuan dan kekhasan UIN terbaca di mata publik. Berikut diuraikan distingsi UIN Raden Fatah yang berbeda dengan universitas lainnya, baik dalam konteks lokal, nasional maupun internasional dan berbasiskan Islam (Afriantoni, 2018).

*Kedua, peningkatan mutu SDM.* Harus diakui bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang membidani kelahiran sumber daya intelektual yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan memproduksi, mengkonstruksi dan merevitalisasi paradigma sumber daya manusia itu, agar mereka memiliki perspektif kognisi, afeksi dan konasi yang baik di mata masyarakat sebagai bekal kehidupannya-tentu saja tidaklah mudah.

Ketiga, peran masih belum optimal. Suatu cita-cita yang senantiasa terus dikejar oleh masyarakat untuk menapaki eksistensi kehidupannya dalam komunitas kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, perguruan tinggi sampai hari ini merupakan jalan elementer bagi masyarakat dalam upayanya menjadikannya kaum elit – kelompok masyarakat yang memberikan pengaruh, dan daya dorong kuat sekaligus juga sebagai pemimpin ditengah suatu komunitas masyarakat. Apapun komunitasnya, apakah komunitas politik, ekonomi, sosial, budaya, profesi dan sebagainya.

*Keempat, belum berfungsi sebagai agent perubahan.* Lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai agen pembaruan dalam masyarakat (*agent of social change*). Yakni Pemahaman dan pemikiran masyarakat yang terbuka dan cerdas dalam bidang apapun (politik, hukum, pendidikan, kesehatan, keagamaan) dan berbagai dimensi lain. Lulusan perguruan tinggi juga diharapkan membawa pencerahan dan memberikan pengaruh bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

*Kelima, korelasi sejarah.* Dalam upaya pengembangan UIN Raden Fatah tersebut, ragam pemikiran tentang distingsi UIN Raden Fatah adalah fenomena akademik yang masih berkembang sampai saat ini. Antara ide, konsep, teori dan realita yang menjadi tuntutan secara luas. Selain itu, tuntutan pasar dan percepatan pengembangan lembaga merupakan realitas nyata. Demikian pula basis pengembangan yang dihubungkan secara korelatif Islam dengan kerajaan Sriwijaya, serta Islam dengan Kesultanan Palembang Darussalam.

Setidaknya, sejak tahun 2014 ditetapkan sebagai UIN Raden Fatah dan disahkan salah satu distingsinya adalah Islam Melayu Nusantara, setidaknya ada sekitar empat tahun berjalan (sekarang 2018), karenanya sudah selayaknya dilakukan berbagai evaluasi terutama terkait implementasi kebijakan distingsi Islam Melayu Nusantara di UIN Raden Fatah.

Secara garis besar evaluasi implementasi ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu *ex-ante evaluation* yaitu (evaluasi pra pembuatan kebijakan), *ongoing evaluation* (mengidentifikasi dampak dan hasil kebijakan), dan 3) *ex-post evaluation* (menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan). Penjelasan lebih lanjut dapat diuraikan.

*Pertama, proses perumusan.* Mengutip teori rasionalisme bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Lebih lanjut dijelaskan mengenai cara – cara formulasi kebijakan disusun dalam urutan: (1)mengetahui preferensi public dan kecenderungannya; (2) menemukan pilihan-pilihan; (3)menilai konsekuensi masing-masing pilihan; (4) menilai

rasio nilai sosial yang dikorbankan; dan (5) memilih alternatif kebijakan yang paling efisien (Tilaar dan Nugroho, 2008).

*Kedua, implementasi kebijakan.* Mustopadidjaja menyebutkan beberapa hal yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu (1) pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk mengelola proses pelaksanaan kebijakan secara baik dan efektif; (2) pemahaman mengenai desain kebijakan secara utuh; (3) pengetahuan mengenai a) keseluruhan aspek dan proses pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh, dan mengenai b) peta dan kondisi lingkungan aktual di mana yang bersangkutan berperan atau di mana kebijakan tersebut dilaksanakan; (4) informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan; dan (5) kemampuan untuk a) melakukan penilaian atas perkembangan pelaksanaan dan untuk b) mengembangkan berbagai kemungkinan langkah tindak lanjut yang dapat berupa usulan mengenai *policy adjustment* ataupun *legal reforms* tertentu, *system improvement* tertentu, dan sebagainya. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem kebijakan yang berlaku dalam kehidupan negara bangsa, dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tilaar dan Nugroho, 2008).

*Ketiga, lingkungan kebijakan.* Lingkungan Kebijakan Publik terbagi dua, yaitu evaluasi lingkungan formulasi kebijakan dan Evaluasi Lingkungan Kebijakan. Evaluasi lingkungan formulasi kebijakan menghasilkan sebuah deskripsi bagaimana lingkungan kebijakan dibuat dan kenapa kebijakan seperti itu. Evaluasi Lingkungan Kebijakan berkenaan dengan factor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan (Tilaar dan Nugroho, 2008).

Dalam konteks pendidikan tinggi Islam sangat menarik untuk dilakukan pengkajian dan penelitian secara lebih mendalam, terkait perkembangannya yang cukup pesat di tengah-tengah masyarakat. Termasuk, implementasi distingsi UIN Raden Fatah yang sampai dengan hari ini masih terus melakukan pengembangan dan perubahan perencanaan kelembangan UIN Raden Fatah menuju pendidikan tinggi berstandar internasional.

Dalam pengembangan tentu merumuskan visi dan misi sangat menentukan kepada distingsi yang akan dirujuk sebagai bagian roda organisasi pendidikan tinggi. Dalam kajian ini distingsi yang ditetapkan sebagai pembeda yang mempengaruhi visi. Sedangkan, visi akan mempengaruhi misi dan mekanisme manajemen secara menyeluruh, dari struktur organisasi sampai aspek keilmuan. Walau terkadang aspek keilmuan cenderung dapat berdiri sendiri tergantung paradigma yang dibangun.

Kajian ini sedikit tidaknya juga akan berbicara tentang pengelolaan Perguruan Tinggi sebagai implikasi pengembangan kajian tersebut. Diyakini bahwa banyak para ahli dan pakar baik sebagai pengambil kebijakan di UIN Raden Fatah maupun dosen-dosen senior yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidang akademik yang lebih layak membahas persoalan ini. Terlepas dari kompetensi dan kapasitas tersebut, penting sekali penelitian untuk menjawab persoalan distingsi UIN Raden Fatah yang masih dalam pergulatan pemikiran yang akan dikembangkan. Karena fokus penelitian ini tentang evaluasi implementasi kebijakan distingsi IslamMelayu Nusantara di UIN Raden Fatah.

### **Research Methodology**

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian pada kesempatan ini biasanya diwujudkan dalam pembuatan rancangan penelitian berupa tempat dan waktu, jenis metode, jenis data, sumber informasi, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan kronologis pengambilan data penelitian juga harus dipersiapkan dengan baik. Penelitian ini menerapkan metode evaluasi dengan menggunakan *Stake Countenance Model*. Pengumpulan dan Pemaparan data menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Hal ini sama dengan yang ditulis oleh Cresswell dan Vicki L. Plano Clark yaitu "*Mix methods research helps answer questions that cannot be answered by qualitative or*

*quantitative approaches alone*” (John W. Cresswell & Vicki L. Plano Clarck, 2007). Pengumpulan dan analisis data penelitian ini lebih didominasi oleh data kualitatif dengan desain berikut:



**Gambar 2**  
**Visualisasikan Analisis Data**

Desain penelitian di atas digunakan untuk mengoleksi, menganalisis, menginterpretasi, dan melaporkan data hasil penelitian. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Cresswell & Vicki L. Plano dalam bukunya *Designing and Conducting Mixed Methods Research* “*research designs are procedures for collecting, analyzing, interpreting, and reporting data in research studies*” (John W. Cresswell & Vicki L. Plano Clarck, 2007).

Model di atas menggambarkan bahwa evaluasi model ini terdiri dari tiga tahapan/pase yaitu; masukan (*antecedents*), proses (*transactions*), dan Dampak (*outcomes*). Pada aspek *Intens/* tujuandimuat komponen atau hal-hal yang dievaluasi, yaitu komponen *antecedents* (alasan dan dasar pembuatan kebijakan, tahapan – tahapan formulasi kebijakan); *transactions* (Implementasi kebijakan yang terdiri dari aspek tahapan dan implementasi kebijakan); dan *outcomes* (hasil kebijakan yang terdiri dari tujuan, sasaran, hasil pelaksanaan kebijakan). Setelah itu dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan intrumen yang dipilih. Hasil data lapangan dicocokkan dengan kriteria evaluasi yang digunakan untuk memutuskan apakah komponen atau hal-hal yang dievaluasi pada aspek *Intens/* tujuansudah memenuhi kriteria atau tidak. Hasil dari proses analisis ini akan menghasilkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan.

## **Result and Discussion**

### **A. Konsep Evaluasi Implementasi Kebijakan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “evaluasi diartikan sebagai penilaian”. Kemudian, Menurut Nawawi “evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya (Nawawi, 2009).

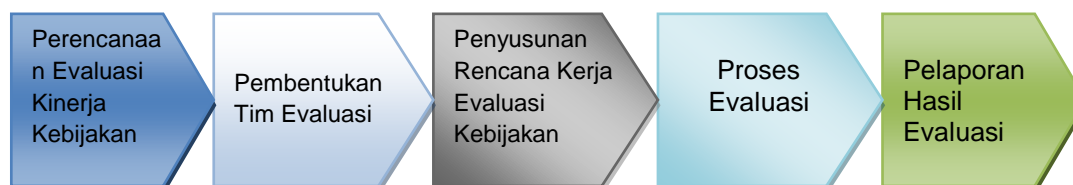
Kemudian, William N. Dunn menulis bahwa secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata – kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003).

Dari kutipan ini dipahami bahwa evaluasi merupakan pengukuran kebaikan (jasa), harga (manfaat), dan nilai sesuatu. Evaluasi juga dapat dipahami sebagai sebagai usaha membedakan kemanfaatan dari ketidakmanfaatan, kemurnian/kebaikan (*precious*) dari ketidakmurnian/ketidakbaikan sesuatu. Juga evaluasi merupakan prosedur analisis kunci dari segala disiplin.

Dalam mengevaluasi kinerja sebuah kebijakan, ada beberapa proses yang harus dilakukan agar tercapai tujuan evaluasi yang diinginkan. *Pertama*, membuat perencanaan evaluasi kinerja. Langkah untuk menentukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, sumber daya yang diperlukan, waktu, serta hal-hal lain yang relevan dengan kebutuhan perencanaan. *Kedua*, membentuk tim evaluasi. Tim ini diperlukan untuk melaksanakan

apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tim ini beranggotakan berbagai unsur (*stakeholder*) yang berhubungan kebijakan yang telah dibuat. *Ketiga*, penyusunan rencana kerja evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, Tim menentukan kerangka kerja dan rencana kerja yang akan dilaksanakan selama proses evaluasi kinerja kebijakan. Dan *keempat*, melakukan evaluasi. Adapun gambar untuk kajian evaluasi ini sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Proses Evaluasi Kinerja Kebijakan**



Nugroho menulis bahwa sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan disebut “evaluasi kebijakan”. Dalam buku lain Nugroho menyatakan bahwa evaluasi acapkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Sesungguhnya kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasilguna atau tidak (Nugroho, 2009).

Gagasan Islam melayu Nusantara dapat diambil dari konsep pemikiran tentang Islam Nusantara yang memang mengedepankan nilai-nilai kelokalan dan kebudayaan lokal. Islam Nusantara menempatkan pribumisasi Islam sebagai metodologi yang melalui proses perwujudan nilai-nilai Islam melalui bentuk budaya local (Arif, 2015). Ma’ruf Amin meletakkan tiga pilar bagi Islam Nusantara yakni pemikiran, gerakan, dan amaliyah (Amin, 2015). Oleh karena itu, Islam Melayu Nusantara sendiri adalah sebuah cara pandang penerimaan masyarakat setempat terhadap Islam yang terbuka atas budaya-budaya lokal.

Hasil penelitian Geertz tersebut, bisa diambil tiga hal penting dari model penelitiannya, *pertama*, Geertz mempunyai perhatian yang kuat pada kekhususan sebuah budaya; *kedua*, penekanan karakteristik pada arti *thick description* tentang agama; *ketiga*, Geertz memasukkan satu kesimpulan yang lebih umum, sebagai contoh keduanya tidak menolak keraguan yang diakibatkan oleh munculnya sekularisme dan skriptualisme. Bagi Geertz hal tersebut adalah bentuk kesamaan umum yang bisa ditarik dari kedua bangsa ini (Clifford Geertz, 1989). Berdasarkan kerangka inilah peneliti akan melakukan pembahasan terhadap distingsi Islam Melayu Nusantara di UIN Raden Fatah. Secara komprehensif, teori Geertz tentang agama sebagai sistem budaya meliputi segala cara atau pola berpikir, perasaan, dan tindakan. Ketertarikan tentang budaya pasti akan memperhatikan objek-objek kebudayaan seperti tradisi yang berkembang, rumah, sandang, jembatan, dan alat-alat komunikasi. Kemungkinan semua aspek inilah yang juga akan menjadi perhatian dalam penelitian ini.

## **B. Kebijakan Distingsi Islam Melayu Nusantara**

Diskursus pemikiran distingsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah bergulat secara alami. Ragam pemikiran tentang distingsi UIN Raden Fatah adalah fenomena akademik yang masih berkembang sampai saat ini. Antara ide, konsep, teori dan realita yang menjadi tuntutan secara luas. Selain itu, tuntutan pasar dan percepatan pengembangan lembaga merupakan realitas nyata. Demikian pula basis pengembangan yang dihubungkan secara korelatif Islam dengan kerajaan Sriwijaya, serta Islam dengan

Kesultanan Palembang Darussalam. Dinamika arah “distingsi” perkembangan kelembagaan dan keilmuan memang selayaknya dibicarakan terbuka agar dinamika keilmuan dan kekhasan UIN terbaca di mata publik. Berikut diuraikan distingsi UIN Raden Fatah yang berbeda dengan universitas lainnya, baik dalam konteks lokal, nasional maupun internasional. Diantaranya yang paling jelas adalah berbasis Islam.

### **1. Berbasis Islam**

Kekhasan UIN ini sudah nyata dalam singkatan UIN dengan simbol huruf “I”. “I” adalah Islam. Namun, pendalaman persoalan keislaman ini perlu dimunculkan mengingat, UIN Raden Fatah ke depan bukan sekedar mencetak agamawan, tetapi juga ilmuwan. Walaupun selama ini agamawan dan ilmuwan sudah dikembangkan, namun dengan UIN, tentu aspek keilmuannya akan lebih luas.

Dalam konteks “Rumah Ilmu” yang disepakati sebagai basis integrasi-ilmu untuk UIN Raden Fatah, juga masih relevan dibicarakan. Karena secara menyeluruh “Rumah Ilmu” belum menjadi pijakan akademik untuk diturunkan dalam bentuk kerangka kurikulum dan pengembangan Fakultas. Walaupun dicantumkan dalam proposal pengembangan lembaga, tetapi arah pengembangannya tidak mengacu secara filosofis dan komprehensif terhadap “rumah ilmu” yang sudah disepakati.

Kemungkinan yang dapat dikatakan bahwa basis “Islam” juga masih diperdebatkan, walau tidak secara terbuka. Namun, kontekstualisasi “rumah ilmu” dalam kerangka pengembangan lembaga semestinya dapat dijadikan basis fondasinya. Tidak serta merta menentukan program studi semata-mata yang terkadang tidak ada relevansinya dengan pengembangan studi-studi keislaman. Alih-alih pengembangan menjadi sukses, justru hal seperti di beberapa program studi di UIN mengalami stagnasi, terutama program studi berbasis Islam. Bagaimana upaya pembenahan, perbaikan dan pengembangannya masih dalam tanda tanya.

### **2. Melayu-Nusantara**

Bagi UIN Raden Fatah Melayu-Nusantara adalah amanah Kementerian Agama RI yang telah disepakati secara bersama oleh UIN Raden Fatah. Untuk itu kajian Melayu Nusantara menjadi distingsi UIN Raden Fatah. Namun demikian, otokritik masih muncul mengingat kontroversinya Melayu di Sumatera Selatan (Sumsel). Bukan hanya itu, karena kajian tentang melayu di Sumsel masih sangat minim. Selain itu, persepektif melayu-nusantara masih dipertanyakan. Jika kajian melayu seperti Harvard University mungkin tidak masalah, namun untuk Sumsel, memang masih dalam dialektika.

Melayu-Nusantara mengakomodasi nilai-nilai kultural masyarakat setempat dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Karenanya, kajian dan kekhasan Melayu-Nusantara menjadi sebuah tradisi Melayu-Islam. Pembentukan tradisi ini tidak lepas dari peran para ulama setempat. Setidaknya dalam kelembagaan harus diperkuat dengan sistem yang mengarah ke sana yang berbasis “Islam” telah berhasil.

Persoalannya adalah “ketepatan historis”, sejarah yang memungkinkan sekali dalam kajian adalah kerajaan Sriwijaya yang didominasi ajaran Budha dan Hindu, sedangkan Melayu didominasi ajaran Islam. Tentu meletakkan Palembang dan Sumsel serta UIN Raden Fatah merupakan diskursus tersendiri.

Dari aspek keilmuan program studi keilmuan politik Islam dan ilmu perpustakaan. Benarkah sudah cocok dan tepat berada di bawah naungan Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Raden Fatah?. Justru setelah mengeluarkan alumni baru dirasakan “pahit” oleh pengguna dan penerima lapangan pekerjaan.

Kemudian, ada juga program studi Sistem Informasi berada di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tentu menyebabkan Program Studi ini menjadi

belum jelas arah dan penerimaan pasar kerja. Benarkah program studi ini tepat diletakkan dibawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Akankah lebih cocok dititipkan kepada Fakultas Sains dan Teknologi yang telah beroperasi. Jika sebagai pengembangan Fakultas Ilmu Komputer, mungkin bisa masuk akal, tetapi, jika tetap berada disana untuk selamanya, maka perlu reposisi.

Belum lagi, pasca pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, serta menyusul Fakultas Psikologi yang tentu akan merujuk kepada distigsi Melayu Nusantara. Bagaimana kesiapan semua prodi-prodi embrio yang mengarah pembentukan fakultas tersebut sampai dengan hari ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

### **3. Market Sumsel**

Selain itu, tantangan berbasis market juga sebagai dasar yang paling “menggiurkan” dalam pengembangan kelembagaan UIN. Mengapa tidak? Sektor market akan menjawab kemana alumni UIN Raden Fatah setelah selesai kuliah. Memang terkait hal ini, para pemikiran tentang pengembangan UIN selain tim perumus dan para pengkaji lain juga harus padu untuk menformulasikan gagasan dalam konteks pengembangan kurikulum, sibalus, lembaga dan bahkan budaya apa yang akan diwujudkan dengan perubahan UIN tersebut.

Jika memperhatikan kebutuhan untuk market Sumsel, maka sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, energi, kemaritiman, dan kelautan merupakan market potensial untuk mengembangkan wilayah Sumsel. Maka sesungguhnya ada wilayah yang mungkin sudah banyak alumni dan mahasiswanya, misalnya pada fakultas atau program studi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, energi, dan kemaritiman di perguruan tinggi negeri dan swasta, tetapi fakultas ini sesungguhnya masih dibutuhkan, karena luas lahan di Sumsel pada sektor ini masih terbuka lebar.

Tetapi tentang “rumah ilmu” dan “melayu nusantara” seharusnya ada pembinaan khusus untuk dosen-dosen muda dan dosen-dosen baru terlebih lagi basis mereka dari universitas umum. Maka, kalau belajar dari UIN Sunan Kalijaga, dosen-dosen barunya ditatar selama empat bulan tentang budaya dan maksud dari integrasi ilmu dalam konteks jaring laba-laba yang dianutnya. Bagi UIN Raden Fatah, memang tidak perlu sepenuhnya mencontoh UIN Sunan Kalijaga, tetapi setidaknya ada konsentrasi yang mengarah ke arah pengembangan filosofi kelembagaan dan distingsi yang telah disepakati.

Untuk memulai semua tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sebab, jangan sampai UIN secara kelembagaan “lepas kontrol” dari keinginan mendasar tentang orientasi lembaga khas Islam. Selain itu, tetap UIN memiliki komitmen untuk tidak menerima paham apapun untuk menjaga stabilitas kelembagaan. Antisipasi seperti ini sengaja diutarakan agar jangan sampai pengembangan kelembagaan menjadi lahan empuk para teroris, fundamental, sekuleris, dan radikal masuk ke dalam UIN Raden Fatah.

### **C. Sejarah Distingsi “Islam Melayu Nusantara”**

Dalam proses transformasi IAIN menjadi UIN Raden Fatah maka, distingsi “Islam Melayu Nusantara” menjadi salah satu hal penting dan sangat strategis selain rumah ilmu yang sudah tersusun dalam naskah akademik. Berikut ini dideskripsikan terkait sejarah dan dasar penerimaan UIN Raden Fatah sebagai tempat melayu yang cukup dominan.

Menurut Ismail yang mendasar UIN Raden Fatah dalam implementasi Islam Melayu Nusantara karena kebijakan yang merupakan amanah dari Kementerian Agama RI. Sejauh ini, amanat tersebut telah dilaksanakan dengan berdirinya Program studi

doktor dalam bidang Sejarah Peradaban Islam yang merupakan titik tolak pembangunan UIN dan distingsi dari pendidikan tinggi agama Islam lain. Sebenarnya sejarah distingsi Melayu ini awalnya dari perubahan UIN menjadi UIN, sehingga membutuhkan sebuah legitimasi untuk permohonan menjadi UIN dapat diwujudkan. Usulannya, memang sudah sejak 2012 sehingga pertimbangannya cukup lama. Baru kemudian berdasarkan kajian dari Kementerian Agama RI, UIN Raden Fatah dapat dilakukan perubahan dengan distingsi dalam bidang Islam Melayu Nusantara (Ismail Sukardi, 2019).

Keberadaan distingsi Islam Melayu Nusantara ini sudah sejak lama diberikan kepada UIN Raden Fatah, bahkan sudah disusun pada tahun 2012. Dimana usulan itu serentak dengan diajukannya rencana perubahan UIN menjadi UIN Raden Fatah salah satu sebagai penguatnya adalah pendirian program studi doktor dalam bidang Sejarah Peradaban Islam (SPI) UIN Raden Fatah.

“Saya rasa adanya sejarah Raden Fatah sebagai raja dan banyaknya ulama Islam di Kota Palembang khususnya Sumatera Selatan adalah bagian terpenting dalam memperjelas sebuah peradaban melayu di bumi Sumatera Selatan ini. Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana UIN memiliki grand desain yang memadai terkait Islam Melayu. Sehingga, kajian ke depan UIN benar-benar memiliki target yang jelas terkait budaya Islam Melayu” (Muhammad Adil, 2019).

Kutipan di atas, menginformasikan bahwa aspek sejarah Islam di Palembang dan wilayah Sumatera Selatan, benar-benar sangat mendasar penerimaan ini. Disamping tidak terlepas dari usaha UIN Raden Fatah dalam membangun perguruan tinggi baru dan menjadikan Islam Melayu Nusantara sebagai distingsi UIN Raden Fatah.

Selain itu, kebudayaan di kota Palembang memang sejak dulu dikenal dengan kebudayaan Melayu Islam dan dengan budaya Jawa ditinggalkan (Lintani, 2019). Ungkapan Vebri ini disampaikan pada seminar sastra dalam rangka untuk penguatan budaya Melayu Islam dengan mengangkat sastra lokal Myang mngukuhkan kebangsaan yang harmonis.

Karena itu menurutnya, ke depan perlu banyak lagi budaya di kota Palembang untuk menambah sastra arab yang membumi di kota Palembang. Sedangkan M Walidin mengatakan, awalnya sastra arab masuk ke nusantara termasuk di Palembang selain di bawa oleh oleh pedagang juga dibawa oleh para ilmuwan/ulama seperti Abdul Somad Al Palembangi dari Palembang, dan Nuruddin Al-Raniri dari Aceh.

“Dari jalur intelektual ini lebih nyata nasab kesastraannya tapi tidak dalam bentuk puisi tapi bentuk lain , kesusastraan yang lain, kalau puisinya menurut saya kita banyak mengutip dari sana (Walidin, n.d.).

Sehingga pengaruh sastra arab ke nusantara itu bisa dari dua jalur bisa jalur perdagangan bisa jalur akademik dimana para ilmuwan/ulama yang menimba ilmu di Arab lalu membawa ilmu Islam ke Palembang dan membuat ratib samman yang ada di Kesultanan Palembang Darussalam.

#### **D. Tahapan-tahapan Kebijakan “Islam Melayu Nusantara”**

##### **1. Melakukan Penyerapan Kebijakan Islam Melayu Nusantara**

Salah satu usaha dalam obseravasi penelitian ini belum optimalnya penyerapan aspirasi publik terkait kebijakan Islam Melayu Nusantara. Penyerapan aspirasi ini diperlukan, karena memang sudah selayaknya lahirnya program studi atau upaya pengembangan kelembagaan di UIN Raden Fatah. Untuk pelaksanaan penyerapan melalui proses awal dengan menampung aspirasi masyarakat kampus UIN melalui 3 (tiga) fase. *Pertama*, pengkajian semua persoalan Islam Melayu Nusantara baik yang berbasis keilmuan Barat ataupun Timur, sejarah, geografi, dan geneologi secara tuntas. *Kedua*, membangun kesadaran Islam Melayu Nusantara yang sama dalam

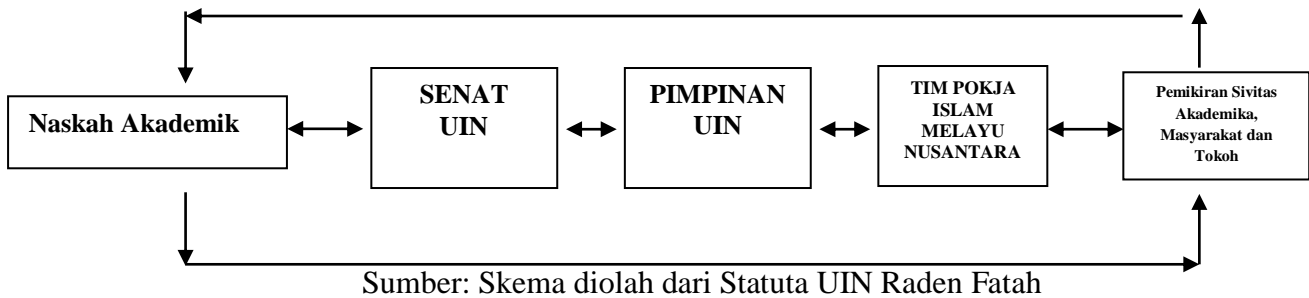


kelompok-kelompok kampus mulai dari pegawai, mahasiswa, dan dosen secara komprehensif. *Ketiga*, merumuskan idealnya Islam Melayu Nusantara UIN Raden Fatah.

Ketiga hal ini merupakan langkah dalam merumuskan program studi dan kerangka Islam Melayu Nusantara yang di kembangkan di lembaga pendidikan tinggi. Jika ketiga hal ini sudah terinternalisasi pada civitas akademika UIN Raden Fatah, kemudian munculnya partisipasi civitas akademika diharapkan muncul dan komitmen *senses of belonging* kepada lembaga sangat kuat.

Dalam hal ini karena dalam tahap tersebut, sivitas akademika dan masyarakat diajak untuk memahami masalah yang berbasis solusi tentatif atas masalah yang dihadapi. Proses penyerapan pemikiran merupakan salah satu fase krusial dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut kelanjutan perkembangan rencana konversi ke UIN. Namun, setiap tahapan dan sebuah proses yang bermanfaat untuk membangun kesadaran bersama atas persoalan yang dihadapi. Proses ini diharapkan diharapkan mampu membantu dan mendorong percepatan pengembangan budaya Islam Melayu Nusantara di UIN Raden Fatah.

### Skema 1 Saluran Serap Pengambil Kebijakan Distingsi Islam Melayu Nusantara



Perlu dicermati bersama skema di atas diketahui bahwa kekuatan utama UIN Raden Fatah dalam melakukan penyerapan tahapan dan pemikiran dari sivitas akademika dan masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai langkah yang sangat positif dalam mengorganisasi struktur-struktur Islam Melayu Nusantara dan *market need* yang ada di tiap daerah. Selain itu, UIN berupaya membangun sistem atau mekanisme serap aspirasi berjenjang mulai dari tingkat paling bawah yakni masyarakat, siswa dan calon siswa. Peran yang dilakukan UIN ini tentu menarik untuk dilihat dalam perspektif perumusan dokumen Islam Melayu Nusantara yakni naskah akademik yang menjadi tolak ukur pengembangan kelembagaan.

## 2. Proses Pembahasan Distingsi Islam Melayu Nusantara

Secara faktual dalam mengelola pemikiran untuk Islam Melayu Nusantara belum memperoleh naskah akademik/naskah Islam Melayu Nusantara UIN Raden Fatah yang dapat memberikan keuntungan secara optimal. Untuk itu, memang mekanisme juga harus dijalankan agar rumusan dapat diterima dengan baik dan penuh dengan kebijakan.

Secara internal, perguruan tinggi dituntut senantiasa menata diri baik dengan menyatukan langkah seluruh anggota civitas akademiknya dalam mengantisipasi perubahan dan tantangan ke depan. Dalam konteks perguruan tinggi Islam, penting untuk melakukan refleksi dalam rangka reorientasi perguruan tinggi Islam sebagai landasan filosofis bagi upaya gerakan dan penyatuan langkah bagi seluruh anggota civitas akademika. Di samping itu, penataan secara internal yang menyangkut aspek

managemen, administrasi, organisasi, pengembangan akademik, adalah hal penting lainnya yang harus segera dilakukan.

Berkenaan dengan hal ini, diskursus ilmiah tentang karakteristik perguruan tinggi Islam, epistemologi pengembangan keilmuan, dan sosok lulusan yang dihasilkan harus menjadi tema sentral. Konseptualisasi hal-hal tersebut harus dilakukan sebab konsep ini akan menjadi dasar kebijakan pengembangan perguruan tinggi Islam lebih lanjut mulai dari tataran konsep abstrak, seperti visi dan misi, struktur kelembagaan, struktur kurikulum di setiap fakultas, jurusan dan program studi, sampai pada arah dan strategi pembinaan dan pengembangan dosen, mahasiswa dan seluruh civitasnya.

### **3. Keterlibatan Pengambil Kebijakan Proses Perumusan Islam Melayu Nusantara**

Peran senat universitas dalam proses perumusan aspirasi ini sangat strategis, maka perumusan arah dan tujuan atau apa yang dapat dikembangkan dalam konsepsi Islam Melayu Nusantara. Tentu semua harus diketahui dan ditetapkan oleh Senat agar dapat senantiasa mengingatkan konsep Islam Melayu Nusantara dan program yang diprioritaskan adalah program yang bisa memberi kemajuan dan mempercepat menjadi UIN Raden Fatah.

**Tabel 2**  
**Peran dan Wewenang Struktur dalam Proses Perumusan Kebijakan Islam Melayu Nusantara**

| <b>No</b> | <b>Pemangku Kepentingan</b> | <b>Peran dan atau Wewenang</b>   |
|-----------|-----------------------------|--|
| 1         | Senat                       | Membahas dan merumuskan point-point arah Islam Melayu Nusantara UIN Raden Fatah<br>Merekomendasikan ke Rektor untuk membentuk Tim yang membahas eksistensi distingsi Islam Melayu Nusantara<br>Merekomendasikan perlunya koordinasi antara pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita Islam Melayu Nusantara<br>Mengesahkan konsepsi dan master plan tentang Islam Melayu Nusantara |
| 2         | Rektor dan Pimpinan         | Wewenang dan fungsinya membahas program atau kebijakan.<br>Membentuk Tim yang membahas eksistensi distingsi Islam Melayu Nusantara<br>Membentuk kepanitiaan khusus untuk menyelenggarakan kegiatan   |
| 3         | Tim Islam Melayu Nusantara  | Merumuskan Tim yang membahas eksistensi distingsi Islam Melayu Nusantara<br>Menetapkan pola kerja bidang-bidang dalam struktur yang membahas eksistensi distingsi Islam Melayu Nusantara<br>Menjalankan program sampai terwujud eksistensi distingsi Islam Melayu Nusantara  |

**Sumber:** Diolah penulis dari pemahaman terhadap realitas dan kerja-kerja struktur di lingkungan UIN Raden Fatah

Menilik tabel di atas, terlihat bahwa keberadaan Senat dan Pimpinan UIN Raden Fatah memiliki otoritas yang cukup besar dalam fase pembahasan suatu usulan

menjadi sebuah program atau kebijakan secara kelembagaan. Walaupun dikatakan bahwa eksistensi kedua institusi tersebut tidak secara langsung melakukan penetrasi-penetrasi terhadap evaluasi terkait implementasi kebijakan Islam Melayu Nusantara. Maka layak dirumuskan dengan baik, salah satunya dengan membentuk kelompok kerja, tim perumus distingi Islam Melayu Nusantara, dan tim pengembangan UIN Raden Fatah dalam mengembangkan Islam Melayu Nusantara.

**Tabel 3**  
**Proses Perumusan dalam Pembuatan**  
**Kebijakan Islam Melayu Nusantara**

| No. | Item   | Langkah Kerja  |
|-----|--|--|
| 1.  | Desain utama                                 | Merumuskan Islam Melayu Nusantara  |
| 2.  | Prinsip                                      | Islam Melayu Nusantara harus sesuai dengan asas-asas yang ada dalam Islam  |
| 3.  | Prioritas kerja                              | Menjaring pemikiran tentang Islam Melayu Nusantara<br>Memberi maslahat banyak orang.<br>Terumusnya struktur Islam Melayu Nusantara UIN Raden Fatah |
| 4.  | Sumber yang dipakai sebagai bahan pembahasan | Buku-buku<br>Hasil serap pemikiran sivitas akademika<br>Hasil survei   |
| 5.  | Acuan atau Referensi                         | Nilai-nilai Islam  |

**Sumber:** Diolah penulis berdasarkan pengamatan dan dari berbagai wawancara

Mencermati tabel di atas, terlihat bahwa hal yang paling mendasar dalam struktur Islam Melayu Nusantara yang akan dikembangkan kemudian yakni kembali kepada Islam. Dengan cara merumuskan pola kerja dan pengambilan kebijakan, maka hasil yang diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi UIN Raden Fatah sendiri.

#### **E. Implementasi “Islam Melayu Nusantara” di UIN Raden Fatah**

Untuk melihat implemenasi “Islam Melayu Nusantara” dalam kampus UIN Raden Fatah, harus dilihat secara menyeluruh dan tidak parsial. Hal yang layak untuk dicermati terkait tentang visi yang ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang.

Gambaran tentang cita-cita masa depan UIN Raden Fatah Palembang yang ingin diwujudkan dalam kenyataan dirumuskan dalam kalimat visi berikut: “*Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami.*” Visi ini menjadi acuan dan arah bagi semua civitas akademika UIN Raden Fatah dalam penyelenggaraan semua kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan akademik serta kelembagaan UIN Raden Fatah Palembang.

Rumusan visi tersebut mengandung tiga nilai pokok (*core values*) yang diharapkan mewarnai setiap gerak dan langkah pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah, yaitu “standar internasional”, “wawasan kebangsaan”, dan “karakter Islami”. Ketiga nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi spirit utama pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah.

##### **1. Keberadaan Islam Melayu dalam Program Internasionalisasi UIN**

Sejak menjadi UIN pada akhir 2014, internasionalisasi menjadi bagian yang tidak saja memwujudkan setiap program dalam kegiatan yang menjalin hubungan dengan dunia serumpun melayu seperti Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Sebab, sejak tahun 2014 UIN Raden Fatah telah membuka apa yang disebut dengan “kelas internasional” pada enam fakultasnya, yaitu Fakultas Syari’ah dan Hukum, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Fakultas

Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat dipisahkan dari eksistensi UIN Raden Fatah. Dalam wawancara dengan berbagai pihak di UIN Raden Fatah, khususnya Muhamad Sirozi, selaku rektor, diketahui bahwa ada beberapa alasan filosofis dan akademik.

Pada kegiatan ini, maka *effect eduvation* antaranya adalah: *pertama*, internasionalisasi diharapkan menjadi sarana dan strategi untuk mewujudkan visi UIN Raden Fatah, yaitu, “*Menjadi universitas berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami*”.

Yang dimaksud dengan Kelas internasional di UIN Raden Fatah adalah: “...kelas khusus yang diselenggarakan dengan menerapkan nilai-nilai akademik dan standar pelayanan pendidikan tinggi yang beraku secara nasional dan diperkaya dengan nilai-nilai akademik dan standar pelayanan pendidikan tinggi yang berlaku di dunia internasional” (Ismail Sukardi, 2014). Jadi ada dua acuan yang dirujuk oleh Kelas Internasional UIN Raden Fatah, yaitu standar pendidikan tinggi di tingkat nasional dan standar pendidikan tinggi yang berlaku di dunia internasional. Untuk yang pertama acuannya cukup jelas, yaitu Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Sedangkan untuk yang disebut terakhir memang tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi dalam buku *Pedoman Umum Pelaksanaan Kelas Internasional UIN Raden Fatah Palembang* pada bagian F. Standar Kompetensi Lulusan, poin 2 disebutkan bahwa lulusan kelas internasional “...memiliki kompetensi akademik bertaraf internasional, sehingga mampu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi kelas dunia (*World Class University*) (Ismail Sukardi, 2014). Meskipun belum eksplisit, frase “kompetensi akademik bertaraf internasional” dan “mampu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi kelas dunia” menunjukkan bahwa standar kompetensi lulusan kelas internasional UIN Raden Fatah sekurang-kurangnya memenuhi syarat untuk masuk ke universitas kelas dunia.

Hal ini sebagai mana diungkapkan oleh Sirozi yang dikutip oleh Ismail di atas secara eksplisit dicantumkan dalam buku *Pedomen kelas internasional yang menyatakan bahwa arah pengembangan kelas internasional ini adalah “...menjadi sebuah model dan pusat keunggulan kegiatan Tri Dharma pada fakultas dan program pascasarjana di UIN Raden Fatah Palembang dengan mutu pelayanan pendidikan berstandar internasional, berwawasan nasional, dan berkarakter Islami”* (Ismail Sukardi, 2014). Bahkan pada pada buku pedoman termaktub bahwa manfaat penting kelas internasional ini adalah (Ismail Sukardi, 2014):

1. Menjadi model yang yang dapat mencontohkan *best practice* penyelenggaraan kegiatan perkuliahan.
2. Menjadi *incubator* penyemaian budaya akademik berstandar internasional.
3. Menjadi basis pengembangan kerjasama akademik tingkat internasional dalam berbagai bentuk, misalnya program *double degree*, *research partnership*, dan *joint publication*.

Pembukaan kelas internasional adalah respons UIN Raden Fatah Palembang terhadap trend globalisasi dan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi. Respon ini sejalan dengan salah satu tantangan pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, bahwa untuk meningkatkan globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **2. Pendirian Program Studi Sejarah Peradaban Islam**

Pendirian Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) merupakan bentuk yang berbeda dalam Pembukaan Islam Melayu adalah salah satu langkah strategi untuk mewujudkan visi pengembangan UIN Raden Fatah, yaitu menjadi sebuah universitas Berstandar Internasional berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami .

Maksudnya, didirikan dari awal yakni Sejarah Peradaban Islam (SPI) yang merupakan Untuk pendirian Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Adab dan Humaniora berdiri sejak tahun 1997, pada penerimaan pertama pada tahun 1997. Selanjutnya didirikan Program Studi S2 Sejarah Peradaban Islam kemudian pada tahun 2000 ini sudah ada 1 program studi yang membuka Islam Melayu yaitu menambah S3 Sejarah Peradaban Islam tahun 2011. Kemudian yang melatarbelakanginya yaitu pertama: sudah jadi program Wakil Rektor 1 yaitu pada saat itu Sirozi untuk mengembangkan Islam Melayu disetiap fakultas sebagai program unggulannya, Memang kita sudah ke visi misi UIN Raden Fatah yaitu berstandar Internasional dari awal sudah memetakan kegiatan dalam menghadapi MEA, kegiatan-kegiatannya seperti itu agar sesuai dengan tema di 2014 itu siap menghadapi MEA, jadi dalam rangka menghadapi MEA itu maka kita menyiapkan sebagai kelas yang paling tidak berstandar internasional menerima dan membuka Islam Melayu sehingga pada tahun 2017 ini kita sudah membuka 2 program studi untuk Islam Melayu (Maaftuhatussolihah, 2017).

Selaras dengan apa di ungkapan oleh Ketua Program Studi SPI Fkultas Adab dan Humaniora.

Yang melatarbelakanginya adalah sebenarnya sudah wajarnya apalagi kami jurusan bahasa dan sastra arab, jadi bahasa dalam pembelajaran sudah memakai bahasa Arab lagi pula kalau Islam Melayu itu patokannya bahasa pengantarnya adalah bahasa internasional kami sudah selama ini menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa arab jadi tinggal meresmikan saja namun pelaksanaannya sudah berlangsung lama, apalagi jurusan bahasa dan sastra arab tidak hanya bahasa arab tetapi dalam penulisan skripsi, ujian skripsinya sudah memakai bahasa arab jadi dengan adanya Islam Melayu semakin resmi semakin legal penggunaan bahasa arabnya (Padila, 2019).

## **3. Pendirian Lembaga Bercirikan Islam Melayu**

Ada beberapa lembaga yang didirikan untuk membuktikan bahwa kepedulian pihak UIN Raden Fatah dalam menghidupkan budaya melayu Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Implementasi Kebijakan Islam Melayu Nusantara sebagai Distingsi UIN Raden Fatah Palembang, di Hotel Amaris (24/7). Padahal seyogyanya selevel UIN Raden Fatah sudah mampu merintis bangunan Balai Melayu seperti Balai Melayu Jogjakarta yang sarah dengan aset-aset Melayu bisa dijadikan rujukan dunia.

## **4. Penerjemahan Al Quran dengan Bahasa Melayu Palembang**

Tidak semua masyarakat Palembang yang paham dengan tuturan Bahasa Palembang halus (Baso Palembang). Bahkan, saat ini para pelafal nya bisa dihitung dengan jari. Namun, para budayawan dan ulama di Palembang punya keinginan untuk tetap melestarikan kebudayaan melayu itu, lewat Alquran yang diterjemahkan dalam Bahasa Palembang. Adalah pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang punya gagasan untuk melestarikan Baso Palembang tersebut. Tapi, UIN Raden Fatah Palembang tidak sendirian, melainkan turut melibatkan Puslitbang Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, ulama dan budayawan Palembang.

"Bahasa Palembang halus ini sudah sangat langka, apa yang tersisa hanya pelafal Palembang sehari-hari yang sudah tercampur dengan bahasa lain. Proyek awal ini, kita

mencari budayawan yang paham Bahasa Palembang halus, sekaligus yang paham bahasa Alquran. Tetapi tidak ketemu satu pun. Jadi kita mengalihbahasakan dari terjemahan Bahasa Indonesia ke Palembang halus” (Alfi Julizun Azwar, 2019).

Menurut Alfi, ide pertama kali menerjemahkan Alquran ke Bahasa Palembang dicetuskan oleh mantan Rektor UIN Raden Fatah, yang juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel, Prof KH Aflatun Muchtar. Saat berkunjung ke Gorontalo pada tahun 2012 lalu, kesadaran beliau (Aflatun) tergugah akan pentingnya mengangkat budaya melayu Palembang lewat Alquran.

### **5. Penelitian dan Pengabdian Berbasis Islam Melayu**

Program Penelitian Kompetitif merupakan salah satu program guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan tinggi Islam yang menjadi tanggung jawab UIN Raden Fatah Palembang sekaligus upaya mencapai Visi dan Misi UIN Raden Fatah Palembang. Program tersebut juga merupakan wujud komitmen UIN Raden Fatah Palembang untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik.

Implementasi program peningkatan mutu penelitian sejalan dengan usaha UIN Raden Fatah Palembang untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas dan terpublikasi di jurnal terakreditasi bahkan internasional terindeks Scopus dan Thomson Reuters. Secara periodik UIN Raden Fatah Palembang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memberikan bantuan dana penelitian berdasarkan asas kompetisi, legalitas, transparansi kualitas, dan akuntabilitas. Espektasi dosen PTKI khususnya UIN Raden Fatah Palembang yang sedemikian besar pada program riset dan publikasi ilmiah dari tahun ke tahun, perlu disikapi secara arif dengan mengupayakan pembiayaan secara proporsional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Penelitian mulai tahun 2015-2019 karena itu akan dilakukan dalam tiga jenis kegiatan, yaitu 1) penelitian berbasis keilmuan, 2) penelitian unggulan Islam Melayu dan 3) penelitian kelompok pengembangan prodi. yang dialokasikan untuk 178 judul penelitian dengan rincian sebagai berikut ; 80 judul untuk penelitian berbasis keilmuan, 20 judul penelitian unggulan Islam Melayu dan 78 judul penelitian Pengembangan Prodi Penelitian Kompetitif Individual Unggulan Islam Melayu *Penelitian Kompetitif Individual Unggulan Islam Melayu* adalah penelitian kompetitif yang dilakukan oleh dosen UIN RF yang diarahkan untuk menghasilkan karya ilmiah bermutu khusus pada bidang Islam Melayu dari berbagai aspek yang dapat dilakukan sesuai dengan tema penelitian yang ditetapkan Puslitpen. Penelitian ini dilaksanakan oleh 1 orang peneliti Dosen Tetap PNS atau Dosen Tetap Non PNS dari berbagai pangkat dan golongan (LP2M, 2017).

### **6. Usaha Pengembalian Budaya Melayu Palembang**

Budaya melayu di kota Palembang yang dulu menjadi identitas masyarakat kota Palembang pernah menjadi tuan di negeri sendiri, namun budaya melayu yang dulu menjadi kearifan lokal masyarakat melayu di Palembang, kini lambat laun mulai hilang. Sejarawan kota Palembang, Kemas A.R. Panji menilai hilangnya budaya melayu dikarenakan perkembangan zaman dan globalisasi dan ketidaktahuan generasi muda saat ini.

Solusinya dengan melakukan publikasi dalam bentuk komunikasi dengan membuat video pendek dan di bagi di medsos dan juga membuat film dokumenter, publikasi video pendek dan sebagainya. Film dokumenter yang baik adalah film yang

isinya berbasis data berupa fakta dan realita, yangawali dengan riset dan observasi. Kemudian diangkat dalam bentuk film/audio visual (Panji, 2019).

Secara prinsip kegiatan workshop akan menghasilkan hasil kerja nyata yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum dan penguatan distingsi lembaga sebagai universitas yang berbasis Islam Melayu. Mahasiswa merupakan salah satu penggerak perubahan dunia. Mahasiswa dinilai memiliki kreatifitas yang harus terus diasah. Oleh karena itu, selain menambah pengalaman, melalui event ini juga mahasiswa diharapkan bisa belajar dan terjun langsung dalam pembuatan suatu kegiatan atau acara.

Kita memiliki Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seni budaya dimana mahasiswa bisa menyalurkan berkreasi dalam bidang budaya,” paparnya. Tidaak hanya itu, tambahannya, setting plan gedung baru UIN Raden Fatah Palembang yang teletak di Jakabaring sudah menggambarkan nuansa Melayu. Selain itu, dicanangkan gedung tersebut atur sedemikian rupa agar terlihat seperti mengambang diatas air. “Sejak jadi UIN kita sudah memfokuskan untuk mengangkat Islam Melayu. Kita sangat berterima kasih adanya apresiasi dari Gubernur Sumsel terhadap UIN Raden Fatah Palembang,” pungkasnya. Terlepas dari semua yang diuraikan di atas, maka rincian lembaga yang turut andil dalam pengembangan Islam Melayu Nusantara:

## Conclusion

Sejarah adanya distingsi “Islam Melayu Nusantara” dalam proses transformasi IAIN menjadi UIN Raden Fatah saling berhubungan, karena sejarah distingsi Melayu ini awalnya dari perubahan UIN menjadi UIN, sehingga membutuhkan sebuah legitimasi untuk permohonan menjadi UIN dapat diwujudkan. Usulannya, memang sudah sejak 2012 sehingga pertimbangannya cukup lama. Baru kemudian berdasarkan kajian dari Kementerian Agama RI, UIN Raden Fatah dapat dilakukan perubahan dengan distingsi dalam bidang Islam Melayu Nusantara.

Dasar bagi pihak universitas menerima dan mengimplementasikan “Islam Melayu Nusantara” sebagai distingsi UIN Raden Fatah perubahan IAIN menjadi UIN salah satu faktor dominan yang cukup rasional untuk dikabulkan permintaan untuk IAIN mengajukan perubahan kelembagaan. Selanjutnya, hasil kajian yang cukup mendalam mengenai kelayakan IAIN menjadi UIN juga sebuah faktor yang tidak cukup hanya sebagai bagian terpisah untuk pengembangan kelembagaan, sehingga permintaan dapat direalisasikan dengan sangat baik.

Dalam konteks pembuatan kebijakan “Islam Melayu Nusantara” sebagai sebagai distingsi UIN Raden Fatah *Pertama*, pengkajian semua persoalan Islam Melayu Nusantara baik yang berbasis keilmuan Barat ataupun Timur, sejarah, geografi, dan geneologi secara tuntas. *Kedua*, membangun kesadaran Islam Melayu Nusantara yang sama dalam kelompok-kelompok kampus mulai dari pegawai, mahasiswa, dan dosen secara komprehensif. *Ketiga*, merumuskan idealnya Islam Melayu Nusantara UIN Raden Fatah.

Tahapan implemetasi “Islam Melayu Nusantara” yang dilakukan sebagai sebagai distingsi UIN Raden Fatah ini sudah terinternalisasi pada civitas akademika UIN Raden Fatah, kemudian munculnya partisipasi civitas akademika diharapkan muncul dan komitmen *senses of belonging* kepada lembaga sangat kuat. Adapun sarana atau media yang digunakan dalam penggalan seharusnya digalakkannya diskusi-diskusi kecil, workshop, lokakarya, kerjasama, budaya-budaya, dan lain sebagainya. Pengkajian dalam rangka penyerapan kebijakan Islam Melayu Nusantara harus berawal oleh UIN Raden Fatah memperlihatkan gejala menarik bagi proses pengembangan UIN menjadi UIN Raden Fatah.

Hasil dari implementasi “Islam Melayu Nusantara” sebagai sebagai distingsi UIN Raden Fatah meluasanya wacana publik terkait Islam Melayu. Adanya kesadaran

masyarakat kampus terkaut distingsi. Dalam hal ini karena dalam tahap tersebut, sivitas akademika dan masyarakat diajak untuk memahami masalah yang berbasis solusi tentatif atas masalah yang dihadapi. Proses penyerapan pemikiran merupakan salah satu fase krusial dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut kelanjutan perkembangan rencana konversi ke UIN. Namun, setiap tahapan dan sebuah proses yang bermanfaat untuk membangun kesadaran bersama atas persoalan yang dihadapi. Proses ini diharapkan diharapkan mampu membantu dan mendorong percepatan pengembangan budaya Islam Melayu Nusantara di UIN Raden Fatah.

### **Bibliography**

- Afriantoni. (2018). Diskursus Distingsi UIN Raden Fatah. *Ukhuwahnews.com*.
- Alfi Julizun Azwar. (2019). Terjemahan Alquran Berbahasa Palembang, Ide - Tantangan & Local Wisdom Bahasa Palembang menjadi pelengkap 20 terjemahan Alquran. *IDN Times*.
- Amin, M. (2015). Khitat Islam Nusantara. *Kompaas*.
- Arif, S. (2015). *Nasionalisme dan Islam Nusantara*. Kompas.
- Berita Pagi. (2018, April). Mengembalikan Kembali Kejayaan Palembang Melalui Kajian Naskah Melayu Berita Headline. *Berita Headline*.
- Clifford Geertz. (1989). *Abangan, Santri, Priyayi*. Pustaka Jaya.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Ismail Sukardi. (2019). *Wawancara Wakil Rektor I UIN Raden Fatah Palembang*.
- Ismail Sukardi, D. (2014). *Pedoman Kelas Internasional UIN Raden Fatah, Palembang*. Rafah Press.
- John W. Cresswell & Vicki L. Plano Clark. (2007). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publications.
- Lintani, V. Al. (2019). Budaya Melayu Islam Berkembang di Palembang. *Maklumatnews*.
- LP2M. (2017). *Buku Pedoman Penelitian UIN Raden Fatah Palembang*. Rafah Press.
- Maaftuhatussolihah. (2017). *Wawancara Dengan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Muhammad Adil. (2019). *Ketua Program Studi Strata 3 Sejarah Peradaban Islam*.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy. Analisis, Strategi advokasi teori dan praktek*. ITS Press.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo.
- Padila. (2019). *Wawancara dengan Kepala Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora*.
- Panji, K. A. (2019). *Workshop Kajian Ilmu Komunikasi, tema Kearifan Lokal Masyarakat Melayu*.
- Sriwijaya Post. (2014). IAIN Siap Menjadi Pusat Peradaban Islam Melayu. *Berita Online Sripoku*.
- Tilaar dan Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan. Pengantar Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik (1st ed.)*. Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun. (2014). *Buku 50 Tahun LAIN Raden Fatah Palembang*. Rafah Press.
- Walidin, M. (n.d.). Wawancara Dosen Fakultas Adab. *Maklumatnews*.